

**LAPORAN PENELITIAN
HIBAH PENELITIAN TIM PASCA SARJANA-HPTP
(HIBAH PASCA)**



**MODEL PENYELENGGARAAN TERPADU DAN
EFEKNYA BAGI PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT:
PEMILU NASIONAL DAN PEMILU DAERAH**

Oleh:

**Dr. Nurhaidnatomo
Dr. KP Eddy S. Wirabhumi, S.H.**

**Dibiayai oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departement Pendidikan Nasional
Sesuai dengan Huruf Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian
Nomor Kontrak: 316/SP2H/PP/DP2M/IV/2010,
Tertanggal 12 April 2010**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
OKTOBER 2010**

LAPORAN TAHUN II PENELITIAN HIBAH PASCA

- A. Judul Penelitian : Model Penyelenggaraan Pemilu Terpadu (Legislatif dan Eksekutif) dan Efeknya bagi Pendidikan Politik Masyarakat
- B. Ketua Peneliti
- a. Nama : Dr. Nurhadiantomo
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. Strata/Gol Fungs. : S3/3 c
 - d. Pangkat/Gol : Lektor Kepala/591
 - e. Fakultas/Jur : Pascasarjana/Magister Ilmu Hukum
 - f. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Surakarta
 - g. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
 - h. Alamat : Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Kartasura Surakarta
 - i. Telpon/Faks : (0271) 717417 / (0271) 71548 / ums@ums.ac.id
 - j. Alamat Rumah : Jl. Semenromo No. 100, Waringinrejo Rt 04 Rw 21
 - k. Telpon/Faks/E-mail : (0271) 632518
- C. Pendanaan dan Jangka Waktu
- Jangka Waktu Penelitian : 3 tahun
 - Biaya yang disetujui Tahun II : Rp 60.637.500,00



Mengetahui
Dekan Pascasarjana

Prof. Dr. H. Kudzaifah Dimiyati, M.Hum

Surakarta, 30 Oktober 2010
Ketua Peneliti

Dr. Nurhadiantomo

Mengetahui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dr. Harun Joko Prayitno

ABSTRAK

Pemilihan umum (Pemilu), yang terdiri atas pemilu legislative, pemilu presiden, dan pemilu kepala daerah pada era reformasi sebagai proses pemunculan wakil rakyat dan pejabat pimpinan melalui jalan pemilihan (voting), yang diproses dalam pengambilan keputusan dengan skala yang sangat besar. Sistem politik pada era reformasi yang cenderung demokratis partisipasif, memungkinkan penyelenggaraan pemilu yang demikian.

Permasalahan yang timbul pada intinya adalah bagaimana penyelenggaraan pemilu dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aspirasi rakyat, berjalan dalam kondisi hukum dan etika politik, dan artinya bagi pendidikan politik masyarakat. Dari sinilah, selanjutnya muncul sejumlah fokus penelitian yang juga dapat dijadikan sebagai tujuan penelitian juga dapat dijadikan sebagai tujuan penelitian. Dari hasil penelitian pendahuluan muncul sejumlah sub-fokus, dan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah perubahan format dan pemilu seperti yang dikehendaki oleh pemilih, dan konsekuensinya pada perubahan regulasi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Selanjutnya, adalah menurunnya derajat partisipasi dalam pemilu di era reformasi; penyelenggaraan kampanye pemilu sebagai proses dan efek komunikasi politik, keterwakilan perempuan, penanam partai politik sebagai infrastruktur politik, dan penetapan caleg DPR berpihak berdasarkan jumlah suara. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, dengan analisis reflektif mengalir hingga pemaknaan temuan-temuan.

Penelitian ini membawa sejumlah hasil yang utama, bahwa publik menghendaki adanya perubahan format pemilu, yang berarti perubahan sistem publik, adalah pemilihan pemilu nasional (pusat) dengan pemilu daerah. Pemilu Nasional merupakan gabungan dari pemilu legislative pusat (DPR dan DPD) dan Pemilu Presiden. Pemilu daerah merupakan gabungan dari pemilu legislatif Daerah (DPR Provinsi, Kabupaten, Kota) dan pemilu eksekutif daerah (Gubernur, Bupati, Walikota). Pemilu Nasional dilaksanakan terlebih dahulu, baru disusul pemilu daerah. Rentang waktu antara pemilu nasional dengan pemilu daerah, selama dua tahun. Waktu dua tahun, untuk persiapan pemilu berikutnya, mengevaluasi hasil pemilu yang sudah berlangsung, dan mengurangi tingkat kejenuhan masyarakat untuk itu diperlukan perubahan sejumlah regulasi, terutama UU politik, yang terdiri atas ini, tergantung dari keamanan politik pemerintah dan DPR Perubahan Format Pemilu, berarti perubahan sistem pemilu.

Selain itu, menurunnya derajat partisipasi dalam pemilu, karena faktor kejenuhan dengan tingginya frekuensi pemilihan secara langsung, dan faktor apatisme, karena publik menganggap bahwa pemilu yang ada belum dapat memunculkan keputusan yang aspiratif. Dalam hal ini kampanye pemilu, publik mengakui adanya peningkatan kualitas, tetapi belum optimal sebagai sarana pendidikan politik masyarakat. Keterwakilan perempuan, masih dengan pendekatan kuantitas, dan belum optimal pada pendekatan kualitas, citra dan peranan partai politik sebagai infrastruktur politik, masih belum memadai sebagai saluran aspirasi rakyat. Tetapi penetapan caleg DPR terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, memperoleh respon positif dari publik, karena memperkuat hak pilih masyarakat.

Kata kunci:

Pemilu Nasional, Pemilu Daerah, Sistem Pemilu

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel dan Diagram	v
Prakata	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	14
III. TINJAUAN PUSTAKA	16
IV. METODE PENELITIAN	31
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	83
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	95

Daftar Table dan Diagram

	Halaman
Tabel 1 : Hasil Pemilu Legislatif 2009	38
Tabel 2 : Hasil Pemilu Legislatif 2004	39
Tabel 3 : Profil Anggota DPR (2004-2009; 2009-2014) menurut komposisi Pekerjaan	45
Tabel 4 : Profil Anggota DPR (2004-2009; 2009-2014) menurut komposisi Pendidikan	47
Tabel 5 : Profil Anggota DPR (2004-2009; 2009-2014) menurut komposisi Agama	48
Tabel 6 : Partisipasi dalam Pemilu Legislatif dari masa ke masa	50
Tabel 7 : Caleg Peraih Suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2009	57
Tabel 8 : Tingkat Partisipasi Pemilu Presiden	70
Tabel 9 : Rekapitulasi Nasional dan Perolehan Suara Pasangan calon	71
Tabel 10 : Sejumlah Janji dan Konflik Politik	72
Tabel 11 : Debat Capres soal isu : ” NKRI, Demokrasi, dan Otonomi daerah ”	78
Diagram	
Diagram 1 :Model Proses dan Efek dalam Pembentukan Hukum	19

PRAKATA

Asalamu' alaikum Wr. Wb

Pemilihan umum (pemilu) baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden, begitu pula pemilu kada, melalui pemilihan (voting) secara langsung, yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih wakilnya dan pemimpinnya, merupakan proses-proses pengambilan keputusan dengan skala yang sangat besar. Hal demikian, tentunya berlainan dengan proses-proses pengambilan keputusan dengan skala yang terbatas, seperti proses-proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Besarnya kesempatan berpartisipasi tersebut, karena sistem politik Indonesia pada era reformasi itu, bersifat demokratis – partisipatif.

Berbagai permasalahan timbul dalam penyelenggaraan pemilu pada era reformasi ini, seperti kecenderungan makin menurunnya derajat partisipasi dalam pemilu, penyelenggara hukum dan etika politik dalam proses-proses pemilu, keterwakilan perempuan, serta citra dan peranan partai politik. Lebih dari itu, masyarakat juga menginginkan adanya perubahan sistem politik, melalui perubahan format pemilu, dalam bentuk pemisahan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah, sebagaimana dijelaskan dalam kajian ini.

Tiga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan atas terselenggaranya penelitian ini, terutama kepada direktora penelitian dan pengabdian kepada masyarakat – direktorat jenderal pendidikan tinggi. Departemen Pendidikan Nasional RI, serta lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 11 Oktober 2010
Ketua Tim Peneliti

Nurhadiantomo